

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi dengan total luas wilayah 7,81 juta km<sup>2</sup> yang mana luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan dengan luas wilayah daratan, yang dihuni oleh 270.200.000 jiwa penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020) tersebar di 17.508 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Marauke. Deklarasi Juanda menekankan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang merupakan kesatuan wilayah darat, laut termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya serta udara di atasnya maupun seluruh kekayaannya merupakan suatu kesatuan wilayah Indonesia. Berdasarkan konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS, 1982) yang menempatkan hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan laut sesuai dengan status hukum bagian laut yang berbeda. Dalam mengelola potensi laut ada beberapa jenis laut yang dibedakan atas derajat dan tingkat kewenangan pemerintah Indonesia terhadap laut-laut tersebut dan perlu mendapat perhatian serta dikelola baik oleh pemerintah Indonesia maupun bersama negara tetangga.

Sebagai negara kepulauan, masalah kelautan dengan segala aspeknya menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam rangka pembangunan nasional. Pembangunan transportasi laut berperan sebagai salah satu urat nadi kehidupan ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan nasional. Pembangunan transportasi laut diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, memiliki kemampuan tinggi yang diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien. Terwujudnya transportasi laut seperti di atas dapat menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah, dan meningkatkan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka untuk mewujudkan salah satu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pengangkutan laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan untuk terciptanya suatu ketahanan nasional, dengan mengutamakan pengaturan kapal yang dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan, pariwisata, dan sektor-sektor lain dari kegiatan pembangunan nasional pada umumnya. Kegiatan pengangkutan laut dilakukan dengan menggunakan kapal sebagai sarana mobilitas orang maupun barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain. Selain biaya operasional pengangkutan yang murah, kapal memiliki kemampuan daya angkut yang lebih besar dibandingkan dengan moda transportasi udara mengingat keterbatasan ketersediaan lapangan udara yang dimiliki negara kita. Peran serta badan usaha milik negara dan swasta dalam sistem transportasi laut di dalam negeri maupun ke luar negeri harus terus didorong untuk meningkatkan frekuensi kecepatan dan kepadatan mobilitas orang maupun barang dalam pengangkutan laut demi tercapainya percepatan pertumbuhan pembangunan nasional yang merata.

Dalam penyelenggaraan pengangkutan laut yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai keselamatan selama kegiatan pengangkutan berlangsung hingga tiba di tempat tujuan. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan yang menjamin keselamatan berbagai kegiatan pelayaran baik di sungai, di laut termasuk kegiatan di pelabuhan, beserta terjaminnya ekosistem lingkungan sungai, danau, dan laut dari pencemaran akibat dari kegiatan pelayaran. Keselamatan merupakan hal yang selalu menjadi prioritas utama dalam bidang apapun termasuk di sub-sektor transportasi laut (Siswoyo, 2016). Menurut Pasal 1 Ayat (32) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

Terkait tentang keselamatan pelayaran, keselamatan pelayaran yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu keselamatan pelayaran pada kapal-kapal milik PT. Jemla Ferry Cabang Ketapang. PT. Jemla Ferry merupakan salah satu perusahaan pelayaran penyedia jasa angkutan penyeberangan yang mengangkut penumpang, kendaraan, dan barang. Prinsip dasar keselamatan pelayaran menyatakan bahwa kapal yang hendak berlayar harus berada dalam kondisi *seaworthiness* atau laik laut. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 bahwa sebelum berlayar, kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan. Pengertian kelaiklautan kapal menurut Pasal 1 ayat (33) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan, dan pencegahan pencemaran dari kapal, serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kapal yang akan berlayar ke laut, sebelumnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengangkut, seperti pada tubuh kapal, alat-alat perlengkapan kapal, awak kapal, dan yang terpenting mengenai *seaworthiness* kapal itu sendiri (Annisa dan Nurbaiti, 2020). Untuk melaksanakan kebijakan di bidang keselamatan, perusahaan harus memiliki sistem manajemen keselamatan (*safety management system*) yang merupakan fasilitas bagi seluruh personel di darat dan di laut. PT. Jemla Ferry menerapkan *Safety of Life at Sea* (SOLAS) yang menjadi standar keselamatan maritim yang wajib diterapkan (*merchant vessel*) berukuran tertentu, dan menjadi induk bagi terbitnya standar (*code*) bagi konstruksi kapal, peralatan, dan pengoperasian. PT. Jemla Ferry telah beroperasi selama 45 tahun dihitung sejak tanggal 6 Januari 1976 berdirinya perusahaan ini dan hingga saat ini masih beroperasi. Beroperasi selama 45 tahun sebagai penyedia jasa angkutan penyeberangan, PT. Jemla Ferry memiliki beberapa riwayat kecelakaan kapal miliknya. Berikut merupakan

kejadian kecelakaan kapal milik PT. Jemla Ferry dalam 10 tahun terakhir (Sumber : Laporan Investigasi Kecelakaan Pelayaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi Republik Indonesia Tahun 2011 s/d 2021) :

1. KMP Gilimanuk menabrak dermaga pada tahun 2013 di Pelabuhan Ketapang;
2. KMP Yasmin menabrak dermaga pada tahun 2014 di Pelabuhan Padang Bai;
3. KMP Menggala tertabrak Kapal Tanker Melawi pada tahun 2015 di Selat Sunda;
4. KMP Virgo 18 bertabrakan dengan KMP Windu Karsa Dwitya milik PT. WKP pada tahun 2019 di Pelabuhan Merak.

Terciptanya kegiatan pengangkutan laut tidak terlepas dari peran perusahaan pelayaran penyedia jasa angkutan penyeberangan. Perusahaan penyedia jasa angkutan penyeberangan menjadi pemersatu atau penghubung dari satu pulau ke pulau lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa keselamatan dan kecelakaan memiliki hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kecelakaan adalah poin utama yang harus dihindari melalui manajemen keselamatan dan keamanan dalam perusahaan pelayaran.

Banyak faktor yang mendukung kelancaran dan keselamatan saat kapal berlayar di laut. Dalam penelitian Hendrawan (2019), kesehatan para awak kapal semua harus benar-benar disiapkan dan dipastikan keberadaan dan keadaannya, kesejahteraan awak kapal, kesehatan penumpang, status hukum kapal, dan pencegahan pencemaran laut oleh kapal, serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu dapat menunjang pelayaran yang aman dan selamat. Selain itu, Hendrawan (2019) menambahkan bahwa perusahaan pelayaran perlu memperhatikan sumber daya manusia yang handal dengan ditunjukannya sertifikat keahlian menjadi hal yang diharuskan untuk menunjang keselamatan pelayaran.

Berdasarkan uraian dan teori-teori di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah yang mendukung keselamatan pelayaran pada kapal-kapal milik PT. Jemla Ferry Cabang Ketapang yang sangat mungkin

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor tanggung jawab pengangkut, faktor anak buah kapal (ABK), dan faktor proses bongkar muat. Untuk itu judul skripsi yang dipilih oleh penulis adalah :

**“FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT, ANAK BUAH KAPAL, PROSES BONGKAR MUAT TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN PADA KAPAL MILIK PT. JEMLA FERRY CABANG KETAPANG”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena keselamatan pelayaran yang belum optimal, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keselamatan pelayaran dapat ditingkatkan, dan apakah terdapat pengaruh dengan tanggung jawab pengangkut, anak buah kapal (ABK), dan proses bongkar muat. Kemudian pertanyaan penelitian (*research question*) adalah sebagai berikut :

1. Apakah tanggung jawab pengangkut berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran?
2. Apakah anak buah kapal (ABK) berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran?
3. Apakah proses proses bongkar muat berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran?
4. Apakah tanggung jawab pengangkut, anak buah kapal (ABK), dan proses bongkar muat secara simultan berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran?.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan pelayaran.
2. Menganalisis pengaruh anak buah kapal (ABK) terhadap keselamatan

pelayaran.

3. Menganalisis pengaruh proses bongkar muat terhadap keselamatan pelayaran.
4. Menganalisis pengaruh tanggung jawab pengangkut, anak buah kapal (ABK), dan proses bongkar muat secara simultan terhadap keselamatan pelayaran.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi di lapangan, sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan di lapangan, dan juga untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Transportasi di Universitas Maritim AMNI Semarang.
2. Bagi Universitas Maritim AMNI Semarang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi terkait keselamatan pelayaran khususnya pada program studi transportasi guna menambah ilmu yang berkaitan dengan bidang pelayaran niaga.
3. Bagi Instansi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pihak manajemen keselamatan PT. Jemla Ferry Cabang Ketapang dalam peningkatan keselamatan pelayaran, serta dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori.
4. Bagi Pembaca bisa digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang skripsi ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal - hal yang berhubungan dengan skripsi ini.

Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas tentang pengertian tanggung jawab pengangkut, anak buah kapal (ABK), proses bongkar muat, keselamatan pelayaran, penelitian terdahulu, hipotesis serta kerangka pemikiran teoritis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Menguraikan metode penelitian yang membahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di dalam hasil dan pembahasan ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, pembahasan dan implikasi manajerial.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**

